

### **BAB III**

## **BUKTI-BUKTI PENINGKATAN HUBUNGAN LUAR NEGERI INDONESIA DENGAN NEGARA-NEGARA MELANESIA DI ERA PRESIDEN JOKO WIDODO**

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi dilantik sebagai Presiden Indonesia ke-7 pada 20 Oktober 2014 menggantikan Presiden SBY yang telah menjabat selama 10 tahun. Sebagai penerus tampuk kepemimpinan di Republik Indonesia, Presiden Jokowi mau tidak mau harus menanggung isu internasional yang sedang menerpa Indonesia yang salah satunya adalah isu pelanggaran isu Papua. Tidak seperti Presiden sebelumnya, Presiden Jokowi langsung mengambil keputusan untuk fokus pada kawasan Pasifik Selatan, terutama pada negara-negara Melanesia sejak masa awal kepemimpinannya. Peningkatan hubungan dengan negara-negara Melanesia merupakan jalan terbaik bagi politik luar negeri Indonesia, terutama untuk membendung isu Papua di dunia internasional. Hal inilah kemudian yang diilhami oleh Presiden Jokowi sehingga memberi intruksi dan kebijakan untuk mewujudkan hal tersebut. Pada BAB III ini akan dibahas mengenai bukti-bukti peningkatan hubungan luar negeri Indonesia dengan negara-negara Melanesia, baik peningkatan dari segi politik, ekonomi dan sosial, serta identitas ke-Melanesiaan.

#### **A. Peningkatan Dalam Bidang Politik**

##### **1. Peningkatan Status di MSG**

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) *Melanesian Spearhead Group (MSG)* yang ke-20 di Honiara, Kepulauan Solomon, yang diselenggarakan pada 24-26 Juni 2015 telah memutuskan meningkatkan status Indonesia dari *Observer* menjadi *Associate Member* organisasi sub-regional tersebut (Arisandy, 2015). Sebelumnya, Indonesia telah menjadi observer pada KTT MSG ke-18 di Fiji, Maret 2011. Peningkatan ini menjadi langkah penting bagi politik luar negeri Indonesia dengan

negara-negara Melanesia dibawah pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini juga menjadi bukti bahwa Presiden Jokowi serius dalam upaya meningkatkan hubungan luar negeri dengan negara-negara Melanesia.

Seperti yang diketahui selama ini, bahwa forum MSG kerap digunakan oleh kelompok pro Papua merdeka untuk mencari simpati dan dukungan dari negara-negara Melanesia. Mereka mencoba menggunakan persaudaraan Melanesia sebagai sarana untuk meraih dukungan dari dunia internasional yang lebih luas, mereka mencoba untuk meraih dukungan sebagaimana yang didapatkan oleh bangsa Kanak di Kaledonia Baru untuk mendapatkan kemerdekaan secara penuh dari Perancis. Sehingga Indonesia perlu hadir disana agar informasi yang didapat oleh negara-negara Melanesia berimbang dan juga dapat menjalin hubungan diplomatik yang erat.

Pada KTT MSG 2015, Indonesia diwakili oleh Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Indonesia Mohammad Fachir dan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato berkaitan dengan pengajuan peningkatan status Indonesia menjadi *associate member* di organisasi negara-negara Melanesia tersebut. Pada kesempatan pidato tersebut Wamenlu Fachir menyampaikan tentang komitmen Indonesia terhadap kemajuan dari organisasi MSG, yakni :

“Sekarang saat menjadi anggota asosiasi, kami berkomitmen untuk mempromosikan kemitraan yang lebih dekat dengan MSG yang akan bermanfaat bagi kedua belah pihak. Kami bertujuan untuk menambah nilai bagi organisasi; Memperluas hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan masyarakat; Menguatkan kerjasama dan mengatasi tantangan bersama; Untuk memperdalam hubungan ekonomi dan kerjasama pembangunan demi kemakmuran masa depan rakyat kita di dalam MSG” (MSG SEC, 2015).

Kelihaian para diplomat Indonesia juga diuji pada KTT MSG kala itu, karena pada saat yang bersamaan *United Liberation Movement for West Papua (ULMWP)* juga hadir dengan diwakili langsung oleh ketuanya Benny Wenda. Sama seperti Indonesia, ULMWP juga mengajukan diri untuk menjadi anggota dari MSG. Mereka berkaca dari keberhasilan *Front de liberation nationale kanak et socialiste (FLNKS)* diterima sebagai anggota dari MSG berkat perubahan ketentuan anggota yang dilakukan pada KTT MSG tahun 2007 melalui "*Agreement Establishing the Melanesian Spearhead Group*", karena status FKNKS dan ULMWP sama yakni sama-sama bukan perwakilan dari negara berdaulat dan sama-sama sedang memperjuangkan kemerdekaan bangsanya diwilayahnya masing-masing.

Dalam pidatonya Wamenlu Fachir juga menggunakan *agreement* tersebut untuk menyinggung negara-negara Melanesia mengenai pentingnya saling menghormati kedaulatan sesama negara anggota MSG.

"Jika kita mengingat kembali Persetujuan Menetapkan MSG di tahun 2007, dinyatakan bahwa Anggota MSG sepenuhnya menghormati prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan antar negara, termasuk prinsip-prinsip kedaulatan, persamaan independensi semua negara dan tidak campur tangan dalam urusan dalam negeri negara anggota" (MSG SEC, 2015).

Pada akhirnya Indonesia diterima permohonannya dan ditingkatkan sebagai *associate member* sedangkan ULMWP yang diwakili langsung oleh Benny Wenda harus puas hanya menjadi *obsever* (peninjau) seperti organisasi-organisasi lain yang diperkenankan hadir oleh MSG. sebuah upaya diplomatik yang perlu diapresiasi bagi para diplomat yang mewakili Indonesia di KTT tersebut.

## **1. Seringnya Kunjungan Pejabat Tinggi**

Dalam sebuah upaya peningkatan dibutuhkan sebuah konsistensi dan fokus untuk meraih hasil yang diraih, hal inilah yang telah dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi dalam meningkatkan hubungan dengan negara-negara Melanesia. Salah satu hal yang telah dilakukan yakni seringnya agenda kunjungan kerja dari pejabat tinggi Indonesia ke negara-negara Melanesia, baik itu Presiden secara langsung, para Menteri, maupun Wakil Menteri. Tujuan utama dari seringnya kunjungan tersebut diharapkan akan meningkatnya rasa saling percaya, sehingga menghasilkan kerjasama-kerjasama yang konkrit antara Indonesia dan negara-negara Melanesia, baik itu dalam bidang politik, ekonomi, perdagangan, lingkungan, maupun sosial.

Pejabat tinggi pertama yang melakukan kunjungan kerja ke negara-negara Melanesia yaitu Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi yang melakukan lawatan ke tiga negara Melanesia yakni Fiji, Kepulauan Salomon, dan Papua Nugini pada tanggal 26 hingga 28 Februari 2015. Dalam kesempatan kunjungan tersebut Menteri Retno selalu menekankan pada penghormatan atas kedaulatan negara masing-masing dan meningkatkan kerjasama ekonomi antar negara dan juga kawasan Pasifik Selatan. Walaupun nilainya belum terlalu tinggi, namun dalam beberapa tahun terakhir ada peningkatan dan berpotensi besar kedepannya. Kunjungan tersebut juga ingin mendorong sektor swasta Indonesia dengan swasta Pasifik meningkatkan perdagangan dan investasi (Tuwo, 2015).

Pejabat tinggi Indonesia kedua yang diutus oleh Presiden Jokowi untuk mengunjungi negara-negara Melanesia adalah Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) yang saat itu dijabat Luhut Binsar Panjaitan pada 30 Maret hingga 3 April 2016. Menteri Luhut dalam kesempatan tersebut mengunjungi negara Papua Nugini dan Fiji, isu yang dibicarakan pada

kesempatan tersebut yaitu masalah HAM dan WNI asal Papua yang tinggal di wilayah Papua Nugini. Menteri Luhut ingin menjelaskan kepada negara-negara di kawasan Pasifik Selatan tentang kondisi dan situasi di dalam negeri Indonesia, termasuk apa yang telah pemerintah Indonesia lakukan dalam penanganan masalah Hak Azasi Manusia (Nasution R. , 2016). Berkaitan dengan keberadaan WNI asal Papua di Papua Nugini, Menteri Luhut menilai keputusan akhir diserahkan kepada mereka masing-masing, terkait dengan apakah mereka ingin kembali ke Tanah Air atau menetap di sana (KOMPAS, 2016).

Presiden Jokowi sendiri melakukan kunjungan pertama ke negara Melanesia pada 11 hingga 12 Mei 2015 silam, yaitu ke Papua Nugini atas undangan Perdana Menteri Peter O'Neill yang menjadi refleksi nyata bahwa kawasan pasifik merupakan “prioritas utama Indonesia” seperti yang disampaikan Wamenlu Fachir pada KTT MSG ke-20 (Bhaskara, 2016). Pada kesempatan tersebut Presiden Jokowi menyampaikan bahwa Papua Nugini merupakan tetangga penting bagi Indonesia serta menyatakan bahwa Indonesia siap menjadi pintu gerbang bagi kerjasama antara ASEAN dan negara-negara Pasifik Selatan. Setelah pertemuan bilateral, para perwakilan kementerian kedua negara menandatangani MOU kerjasama pengembangan sumber daya migas, dan pencegahan serta memerangi kejahatan antara negara (Humas Setkab, 2015).

## **A. Peningkatan Dalam Bidang Ekonomi dan Sosial**

### **1. Peningkatan Kerjasama Ekonomi**

Dalam kesempatan KTT MSG Ke-20, Wamenlu juga menyampaikan tentang potensi kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan negara-negara Melanesia.

“Yang terhormat, Hadirin yang saya dimuliakan, Berkembang bersama untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi juga sangat penting. Saya

yakin sepenuhnya bahwa kita bisa melipatgandakan perdagangan dua arah sebesar USD 260 juta di tahun-tahun mendatang. Penyediaan kerjasama teknis dapat membantu pencapaian perwujudan ekonomi yang lebih baik. Dalam semangat ini, Indonesia tetap teguh dalam memberikan kerjasama teknis melalui program pengembangan kapasitas di bidang pengolahan hasil perikanan, pembuatan kerajinan tangan, seni dan budaya, kursus diplomatik, jurnalisme dan pengembangan sumber daya manusia” (MSG SEC, 2015).

Sampai saat ini, Indonesia telah menyelenggarakan tidak kurang dari 130 program kerjasama teknis, melibatkan 583 peserta dari negara-negara Pasifik. Kerjasama teknis tersebut diantaranya dalam sektor seperti pertanian, perikanan, *good governance*, disaster management, pendidikan, pemberdayaan perempuan dan lain sebagainya. Dalam kerjasama tersebut pemerintah Indonesia mengklaim telah menggelontorkan dana bantuan sekitar 1,8 juta dolar AS atau sekitar Rp23,6 triliun kepada negara-negara anggota MSG. hal tersebut disampaikan oleh Juru bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir yang dilansir melalui KBR.id :

"Selama ini kita juga terus memberikan bantuan *capacity building* kepada negara-negara MSG dari 2014 sampai dengan 2016 ini. Jumlahnya sudah lebih dari sekitar USD 1,8 juta bantuan teknis dalam bentuk *capacity building*. Kita berikan kepada negara-negara anggota MSG di berbagai sektor seperti pertanian, perikanan, *good governance*, *disaster management*, pendidikan, pemberdayaan perempuan dan lain sebagainya. Itulah nuansa kita" (Wijaya, 2016).

Komoditas ekspor utama Indonesia ke negara-negara Melanesia yaitu sabun, produk kertas, kendaraan

bermotor, sereal atau produk gandum, plastik, furnitur, alas kaki, dan alat elektronik. Fiji adalah negara Melanesia dengan nilai total perdagangan bilateral tertinggi dengan Indonesia pada tahun 2015, yakni dengan total mencapai 21,247 juta Dollar AS menurut data Kementerian Perdagangan RI (Nasution R. , 2016). Hal tersebut tentu menjadi acuan bagi Indonesia untuk meningkatkan juga perdagangan dengan negara-negara Melanesia lainnya.

Indonesia ingin melanjutkan keterlibatan positif ini dengan membangun konektivitas yang lebih kuat dengan sesama anggota MSG. Konsep Indonesia tentang titik api maritim yang dicetuskan oleh Presiden Jokowi menekankan pada "konektivitas" sebagai salah satu pilarnya. Konektivitas yang lebih baik akan membuka peluang yang lebih luas bagi semua orang. Melalui keanggotaan Indonesia di MSG, konektivitas antara warga negara anggota-anggota MSG dan 11 juta orang Melanesia Indonesia akan ditingkatkan. Ini juga akan membuka akses yang lebih besar kepada calon investor dan pasar potensial bagi 253 juta orang Indonesia (MSG SEC, 2015).

Indonesia juga bisa menjadi pintu gerbang bagi negara-negara Melanesia yang juga anggota MSG untuk memasuki pasar ASEAN, yang tentu saja lebih besar dari pasar di Kawasan Pasifik Selatan. ASEAN merupakan pasar yang besar, dimana ada sekitar 600 juta jumlah populasinya atau setara dengan 9% jumlah populasi dunia. Wamenlu Fachir juga menjanjikan komitmen Indonesia untuk MSG adalah nyata dan konkret yang bermanfaat bagi semua anggotanya (MSG SEC, 2015). Indonesia berusaha menggunakan ekonomi sebagai salah satu sarana diplomasi untuk meningkatkan hubungan dengan negara-negara Melanesia.

## **2. Bantuan Penanggulangan Bencana Alam**

Kawasan Pasifik Selatan merupakan kawasan yang rawan terhadap berbagai bencana alam, seperti topan, gempa bumi, tsunami, dan banjir. Hal tersebut

dikarenakan wilayah mereka yang berada ditengah samudera yang luas tetapi dengan luas wilayah daratanyang kecil dan juga berada digaris cicin api vulkanik Pasifik. Perubahan iklim yang disebabkan oleh pemanasan global juga berdampak pada wilayah tersebut, sehingga bencana alam sulit dihindari, termasuk juga bagi negara-negara Melanesia.

Pada pertengahan Maret 2015, bencana alam Topan Pam menghantam kawasan Pasifik Selatan dan Vanuatu menjadi negara yang paling terdampak akibat bencana tersebut. Topan tersebut menyebabkan jatugnya korban jiwa dan kerusakan infrastruktur yang masif, sehingga melumpuhkan ibukota Vanuatu dan juga memutus akses ke puluhan pulau dan kota di Vanuatu. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri memberikan bantuan senilai total dua juta Dollar AS untuk membantu pemulihan di Vanuatu pasca bencana tersebut. Bantuan tersebut berupa bahan makanan, pakaian, paket untuk ibu dan anak, mesin genset, obat-obatan, tenda posko dan keluarga, kasur lipat, alat kebersihan pribadi dan kesehatan lingkungan (Gabrillin, 2015).

Bantuan dikirimkan menggunakan pesawat kargo Boeing 737-800 dan pesawat Airbus A-330, bantuan tersebut diterima langsung oleh Menteri Perubahan Iklim Vanuatu James Bule dan langsung didistribusikan ke wilayah-wilayah terdampak di seluruh pelosok Vanuatu. Selain mengirim bantuan berupa barang, pemerintah Indonesia juga mengirim Tim Terpadu berjumlah 19 orang yang terdiri dari berbagai instansi, tim bertugas untuk meninjau secara langsung yang kemudian menjadi dasar untuk menentukan bantuan dan dukungan pada masa rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana. Bantuan Indonesia kepada Vanuatu merupakan bentuk solidaritas dan hubungan khusus antar kedua negara yang sama-sama memiliki akar budaya Melanesia (Arisandy, 2015).

Selain Vanuatu, negara Melanesia lainnya yang sempat terkena bencana Topan yaitu Fiji. Bencana Topan



Winston menghantam negara Fiji pada tanggal 21-21 Februari 2015. Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan menyerahkan secara simbolis bantuan senilai lima juta dolar AS kepada Perdana Menteri Fiji JV Bainimarama saat melakukan kunjungan kehormatan ke Fiji pada tanggal 31 Maret 2015 (Nursalikhah, 2015). Pada kesempatan tersebut Menteri Luhut juga menyampaikan bahwa Indonesia juga akan mengirim satu kompi pasukan Zeni TNI-AD untuk membantu proses rekonstruksi pasca-bencana Topan Winston di wilayah Fiji.

Indonesia dibawah pemerintahan Presiden Jokowi sangat memperhatikan kawasan Pasifik Selatan terutama negara-negara Melanesia yang memiliki kerawanan bencana, sama seperti yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia. Sehingga dengan adanya peningkatan hubungan akan muncul kerjasama antara Indonesia dengan negara-negara Melanesia dalam menghadapi perubahan iklim dan bencana yang dapat mengancam masing-masing negara. Hal senada juga disampaikan oleh Wamenlu Fachir dalam pidatonya di forum KTT MSG Ke-20 yang diikuti dari msqsec.com :

“Sebagai negara kepulauan, seperti kebanyakan negara Pasifik, kita dihadapkan pada tantangan bersama. Tantangan bencana alam ... Tantangan perubahan iklim ... Dan tantangan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Inilah tantangan utama yang harus kita hadapi bersama. Inilah tantangan yang menuntut usaha bersama untuk berkembang bersama. Singkatnya, berkembang bersama menyiratkan penguatan komitmen kita untuk bekerja lebih dekat dengan saudara dan saudari kita di MSG ... baik secara bilateral maupun multilateral” (MSG SEC, 2015).

Meskipun bantuan-bantuan tersebut bertujuan untuk kemanusiaan, tetapi bantuan tersebut juga menjadi sarana diplomasi yang efektif bagi Indonesia untuk mendekatkan

diri dengan negara-negara Melanesia. Indonesia berusaha untuk muncul sebagai saudara ketika negara-negara Melanesia mengalami bencana, sehingga dengan semangat persaudaraan ke-Melanesiaan telah muncul dari masyarakat di negara-negara Melanesia terhadap Indonesia maka pemerintah Indonesia telah berhasil untuk mencapai tujuan kepentingan nasionalnya.

## **B. Penegasan Melanesia Sebagai Sebuah Identitas**

### **1. Festival Kebudayaan Melanesia**

Indonesia sebagai sebuah negara yang pluralis, dimana Indonesia memiliki sangat banyak suku dan bangsa yang mendiami kurang lebih di 17.000 pulau di kawasan Nusantara. Oleh karena itu, para pendiri Indonesia memilih menggunakan *motto* “Bhineka Tunggal Ika” yang artinya “Berbeda-beda Tetap Satu Jua” sebuah kalimat ampuh untuk menyatukan ratusan suku bangsa di Indonesia. Di Indonesia terdapat dua ras utama, yaitu ras Mongoloid yang mayoritas mendiami kawasan Indonesia bagian barat, dengan bercirikan kulit kuning langsung atau sawo matang dengan rambut lurus atau bergelombang. Ras yang kedua yaitu ras Melanesia yang banyak mendiami kawasan Indonesia bagian timur, dengan bercirikan kulit gelap dan rambut yang ikal atau keriting. Dari kedua ras tersebut kemudian diklasifikasikan kembali menjadi ratusan suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Selama ini, kelompok pro kemerdekaan Papua selalu menyuarkan tentang pelanggaran HAM yang dilakukan oleh militer Indonesia terhadap masyarakat lokal Papua serta adanya upaya genosida terhadap ras Melanesia di Papua. Kelompok pro kemerdekaan Papua berusaha menggalang dukungan dari negara-negara Melanesia untuk meraih dukungan internasional atas upaya mereka untuk memerdekakan Papua dari Indonesia. Dengan kata lain mereka menggunakan politik identitas untuk meraih kepentingan mereka dan identitas Melanesia dijadikan

untuk alat politik mereka. Menurut Zainal Abidin Bagir politik identitas yaitu :

“Politik identitas adalah nama untuk menjelaskan situasi yang ditandai dengan kebangkitan kelompok-kelompok identitas sebagai tanggapan untuk represi yang memarjinalisasikan mereka di masa lalu. Identitas berubah menjadi politik identitas ketika menjadi basis perjuangan aspirasi kelompok” (Bagir, 2011, p. 18).

Untuk mengimbangi manuver yang dilakukan oleh kelompok pro kemerdekaan Papua, pemerintah Indonesia juga melakukan politik indentitas untuk mengimbangi apa yang telah dilakukan oleh kelompok pro Papua. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa Indonesia merupakan rumah bagi kurang lebih 11 juta jiwa ras Melanesia. Pemerintah Indonesia menggunakan cakupan yang lebih luas untuk menggambarkan ras Melanesia di Indonesia, karena jika merujuk pada pembagian dua ras besar di Indonesia maka ras Melanesia bukan hanya Papua tetapi juga Maluku dan Nusa Tenggara (Timur). Berarti ada lima Provinsi di Indonesia yang penduduknya merupakan ras Melanesia, diantaranya yaitu Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat.

Pemerintah Indonesia berusaha menunjukkan kepada negara-negara Melanesia bahwa Indonesia merupakan negara yang tidak diskriminatif terhadap salah satu ras ataupun suku yang ada di Indonesia. Dengan menggunakan pedoman *motto* “Bhineka Tunggal Ika”, Indonesia berupaya untuk meneguhkan identitas ke-Melanesiaan. Salah satu cara yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia yaitu melalui kebudayaan Melanesia dengan mengadakan Festival Kebudayaan Melanesia yang dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2015 di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan pidato di KTT MSG Ke-20, Wamenlu Mohammad Fachir secara

langsung mengundang negara-negara Melanesia anggota MSG untuk ikut berpartisipasi di kegiatan tersebut (MSG SEC, 2015).

Festival Kebudayaan Melanesia atau *Melanesian Cultural Festival (MCF)* pertama kali diselenggarakan di Kepulauan Solomon pada 1998. Kemudian secara bertahap berkembang menjadi acara tahunan yang rutin dilaksanakan oleh negara-negara Melanesia. Sebelum menjadi tuan rumah pada Oktober tahun 2015 di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia juga sudah berpartisipasi di Festival Kebudayaan Melanesia tahun 2014 yang diselenggarakan di Papua Nugini. Kala itu Indonesia diwakili oleh Provinsi Papua yang membawa dua tim tari dari Jayapura dan Kabupaten Keerom, sekaligus menjadi tamu kehormatan pada acara pembukaan. Selain itu, potensi Papua seperti buah merah dan batik papua juga akan ditampilkan. Tujuan dari Festival tersebut yaitu untuk melindungi dan melestarikan budaya Melanesia yang beragam serta mempererat persaudaraan masyarakat Melanesia. Seperti yang telah dijelaskan diawal bahwa Melanesia tersebar di beberapa negara di kawasan Pasifik, termasuk Indonesia (Annas, 2014).

Indonesia untuk pertama kalinya menjadi tuan rumah penyelenggaraan Festival Budaya Melanesia yang berlangsung dari tanggal 26 hingga 30 Oktober 2015. Festival dihadiri para pemangku kepentingan bidang kebudayaan dan seniman serta sedikitnya 800 orang dari Indonesia, Fiji, Papua Nugini, Pulau Solomon, Timor Leste, Vanuatu dan Kaledonia Baru serta perwakilan dari *Melanesian Spearhead Group* yang berpusat di Vanuatu, kegiatan dilaksanakan di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kegiatan tersebut dibuka oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan di Hotel Swiss Bellin Inn Kristal Hotel Kupang (Andarningtyas, 2015).

Festival meliputi kegiatan konferensi budaya Melanesia, berbagai pertunjukan tarian dan kesenian lainnya di UPT Taman Budaya NTT, pameran benda-

benda budaya Melanesia di Museum Negeri NTT, pemutaran film-film dan dokumenter budaya Melanesia (BATAS NEGERI, 2015). Indonesia sendiri mengirimkan perwakilan dari lima provinsi yang berpenduduk Melanesia yaitu Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Tiga film dari Indonesia akan diputar dalam festival tersebut, yaitu "Atambua 39 C", "Tanah Mama" dan "Cahaya Dari Timur". Jajang C Noer dan Chico Jericho akan hadir dalam pemutaran film tersebut. Selain Indonesia, Fiji dan Kaledonia Baru turut mengirimkan film dari negara mereka untuk ditayangkan di forum masyarakat dengan budaya Melanesia (Andarningtyas, 2015).

#### **Gambar 1.4 Salah Satu Penampilan di Festival Kebudayaan Melanesia**



Sumber : [www.kemdikbud.go.id](http://www.kemdikbud.go.id)  
 (<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2015/11/Melanesia-Culture-Festival.jpg>)

Menteri Baswedan mengatakan, festival ini merupakan ajang untuk merayakan kebinekaan di Pasifik yang tak dibatasi garis-garis administrasi maupun batas

negara. Ia berharap, festival ini dapat membangun hubungan langsung antar negara di kawasan Pasifik, khususnya dalam hal penerbangan langsung dari dan ke negara Pasifik. Dasar dari penyelenggaraan festival ini tidak hanya semata-mata karena persamaan masa lalu dan garis darah, akan tetapi karena memiliki cita-cita yang sama. Cita-cita dalam hal membentuk negara yang adil, bersatu dan bersaudara. Perbedaan tidak boleh menghalangi persatuan karena perbedaan sendiri dapat dirawat, dikembangkan serta diperkenalkan pada dunia yang lebih luas lagi (bpbali, 2015). Melalui kegiatan Festival Kebudayaan Melanesia ini, Indonesia ingin meneguhkan identitas ke-Melanesiannya yang diwakili oleh masyarakat di kawasan timur Indonesia, sehingga Indonesia lebih mudah untuk diterima oleh masyarakat di negara-negara Melanesia.

## **2. Pembangunan Pusat Kebudayaan Melanesia**

Pusat kebudayaan Melanesia akan dibangun di Manokwari, Provinsi Papua Barat. Pemerintah Indonesia akan memfasilitasi pembangunan tersebut secara penuh. Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam Mayjen TNI Yoedi Swastono mengatakan, pembangunan tersebut merupakan kelanjutan dari peresmian organisasi Persaudaraan Melanesia Masyarakat Indonesia (PMMI). PMMI akan menjadi wadah menampung aspirasi masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

Mayjen Yoedi menyampaikan bahwa PMMI merupakan pen jembatan antara pemerintah dan masyarakat Melanesia Indonesia dalam menentukan arah kebijakan politik yang dilihat dari aspek kultural di lima wilayah yang menjadi anggota, termasuk arah pembangunan di Papua Barat itu sendiri. Hal tersebut disampaikan di dalam seminar nasional 'Tindak Lanjut Kebijakan Presiden Jokowi Untuk Papua Tanah Damai' di Auditorium lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI),

Jakarta pada 27 Januari 2016. Kemudian lembaga PMMI akan menjadi perwakilan Indonesia dalam forum internasional seperti *Melanesia Spearhead Group (MSG)*. Pemerintah sangat serius memperhatikan Papua sebagai bagian utuh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (INDONESIA SATU, 2016).

Menurut Prof Dr Harry Truman Simanjuntak, seorang Arkeolog dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional menjelaskan bahwa leluhur yang datang ke Nusantara ada yang tetap tinggal dan ada yang bermigrasi hingga ke Australia dan berpusat di Papua, Papua Nugini dan Australia. Budaya yang berkembang di Papua dan Papua Nugini meluas sampai ke Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat serta timur jauh seperti Fiji dan Vanuatu. Bukti-bukti peninggalan Melanesia menunjukkan sub-ras tersebut hadir di Australia, yang diwakili oleh Aborigin, sejak 60.000 tahun lalu. Sementara itu peninggalan di Indonesia menunjukkan mereka datang 45.000 sampai 50.000 tahun yang lalu (Andarningtyas, 2015). Sehingga pembangunan pusat kebudayaan Melanesia di Manokwari, Papua Barat sangat penting untuk memahami bagaimana sejarah dan persebaran ras Melanesia di Indonesia dan Pasifik. Hal itu juga bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman bahwa dua ras terbesar di Indonesia, Mongoloid dan Austronesia, bersaudara dan berinteraksi secara budaya dan biologis sejak puluhan ribu tahun lalu.

Selain pusat kebudayaan Melanesia, di Manokwari juga akan dibangun gedung *Melanesian Center* yang diinisiasi oleh Universitas Papua (Unipa) bersama Kementerian Luar Negeri. Dekan Fakultas Sastra dan Bahasa Unipa, Andreas Deda mengatakan Papua membutuhkan pusat studi tentang sejarah, budaya dan segala hal yang bersangkutan dengan peradaban Melanesia, terkhusus di wilayah Papua dan Papua Barat. Andreas mengatakan bahwa Papua memiliki budaya dan bahasa yang beragam, namun selama ini tidak memiliki

catatan sedikit pun. Menurutnya hal ini merupakan kelemahan dan harus segera disikapi sebagai upaya untuk menjaga agar budaya dan bahasa Papua tidak punah.

Andreas mengaku telah berkoordinasi dan melakukan pertemuan dengan Kepala Pusat Penelitian Kementerian Luar Negeri dan Ia berharap bahwa rencana ini dapat terwujud secepat mungkin, karena menurutnya kelemahan di Papua adalah masalah data dan bukti-bukti sejarah. Kita mengetahui banyak hal tentang budaya dan sejarah tapi kita tidak punya catatan atau bukti. Andreas mengungkapkan bahwa catatan tentang sejarah dan peninggalan budaya Papua selama ini lebih mudah diperoleh di luar negeri seperti Jerman, Belanda, Australia dan beberapa negara lain. Ia ingin, keberadaan *Melanesian Center* menjadi pusat pustaka dan studi tentang segala hal terkait Papua.

Menurut Andreas, pendirian gedung *Melanesian Center* akan didukung dengan berbagai penelitian tentang Manusia Papua, diantaranya bahasa Papua dan sejarah manusia Austronesia di sebagian besar wilayah pesisir Papua dan Papua Barat. Andreas menututurkan:

“Saya cukup tahu tentang Papua karena saya pernah kuliah di Hawaii. Disana dokumen tentang Papua masih ada dan disimpan secara baik. Kami ingin ketika orang mau tahu tentang Papua, cukup datang kesini, tidak perlu kuliah ke luar negeri” (MEDIA PAPUA, 2016).

Dokumen tentang Papua sangat mudah ditemukan di luar negeri karena banyak pakar dari negara-negara tersebut melakukan penelitian di Papua. Sementara sumber daya Papua kala itu masih minim dukungan dana dari pemerintah. Oleh sebab itu Ia mengajak para pakar dan ilmuan di Papua untuk bangkit, karena dana Otonomi Khusus yang dikucurkan oleh pemerintah pusat cukup besar, tapi kenapa tidak bisa sebagian dimanfaatkan untuk kegiatan ilmiah. Papua butuh fasilitas yang memadai



untuk menyimpan dokumen agar tidak hilang hingga ratusan bahkan ribuan tahun yang akan datang.

Selain ekonomi dan bantuan kemanusiaan untuk bencana alam, kebudayaan juga menjadi sarana diplomasi yang efektif yang telah digunakan oleh pemerintah Indonesia di era Presiden Joko Widodo dalam meningkatkan hubungan dengan negara-negara Melanesia. Peningkatan hubungan dapat terwujud jika adanya rasa saling percaya dan dibarengi dengan rasa solidaritas yang berdasarkan kepada identitas yang lahir dari kesamaan budaya dan leluhur, serta kerjasama yang saling menguntungkan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam peningkatan hubungan tersebut, dalam hal ini yaitu Indonesia dan negara-negara Melanesia.